Nomor : …………………..

Lamp : …………………..

Perihal : Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.....\*\*

Kepada Yth,

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum

Provinsi/Panitia Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota ………

di …………

1. IDENTITAS PEMOHON DAN TERMOHON

1. a. Nama : ................................................

b. Pekerjaan/Jabatan : ................................................

c. Kewarganegaraan : ................................................

d. Alamat : ................................................

e. Nomor Telepon/HP : ................................................

f. Nomor faksimile : ................................................

2. a. Nama : ................................................

b. Pekerjaan/Jabatan : ................................................

c. Kewarganegaraan : ................................................

d. Alamat : ................................................

e. Nomor Telepon/HP : ................................................

f. Nomor faksimile : ................................................

Sebagai pasangan Calon …………… yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota atau Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung pasangan calon, yang tidak ditetapkan KPU (atau permasalahan obyek sengketa lain), dalam hal iniberdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ............. tanggal .................. memberikan Kuasa kepada:

1. ………………

2. ………………

3. ……………………… dan seterusnya (bila ada)

Semuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dari ....................., selanjutnya disebut Penerima Kuasa, yang berkedudukan di .................... dengan alamat ....................., nomor telepon/HP ....................., nomor faksimile ......................, baik sendirisendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut --------------------- PEMOHON

Dalam hal ini mengajukan Permohonan penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi atau Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Nomor .... Tahun ....... tentang .........

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota …............... yang berkedudukan di (alamat, kode pos dan Nomor Telepon/faksimile) ................., selanjutnya disebut ------------------------------------------------------ TERMOHON

1. KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI/PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

(Uraikan perihal kewenangan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota dalam memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa sebagaimana tersebut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UndangUndang)

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

(Uraikan perihal kedudukan hukum [legal standing] Pemohon dengan merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UndangUndang)

IV. KEDUDUKAN HUKUM TERMOHON

(Uraikan perihal kedudukan hukum [legal standing] Termohon dengan merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang)

V. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan ke Badan Pengawas Pemilihan UmumProvinsi/Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ketika KPU menerbitkan Keputusan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota nomor…. tentang Bahwa penetapan/pengumuman Keputusan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dilakukan pada hari ...... tanggal ...... bulan ..... tahun ….. pukul ....... (tambahkan penjelasan lain yang dianggap perlu)

VI. POKOK PERMOHONAN

Pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai obyek permohonan yang disengketakan Pemohon … (Jelaskan secara detail klaim versi pemohon yang benar dengan membandingkan pengumuman keputusan yang dilakukan oleh termohon. Dalam perbandingan ini silakan disebutkan data-data antara pemohon dan termohon. Jelaskan pula sebab terjadinya perbedaan dimaksud disertai alat bukti.) Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Keputusan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota…….. Nomor ................ tanggal…............ tentang….. yang diumumkan pada hari ......... tanggal ......... tahun … pukul .......... WIB, yaitu sebagai berikut: ……………………………………………………………………………….......

VII. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

Pada bagian ini, Pemohon menguraikan alasan-alasan permohonan sengketa berupa fakta-fakta yang disengketakan (Jelaskan secara detail yang disertai bukti pendukung)

VIII. PETITUM (hal-hal yang dimohonkan Pemohon)

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan UmumProvinsi/Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota……untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Mengabulkan/Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau sebagian

Membatalkan Keputusan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota…. Nomor…. Tentang….

Meminta kepada KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota….. untuk melaksanakan Putusan ini.

Apabila Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota ….berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikianlah permohonan Pemohon, dengan harapan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi atau Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota……. dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini secara adil.

Hormat kami,

PEMOHON/KUASA HUKUM PEMOHON

|  |  |
| --- | --- |
| PEMOHON   1. Nama   Materai  60000  (Tanda tangan)   1. Nama   (Tanda tangan) | KUASA HUKUM   1. Nama   (Tanda tangan)   1. Nama   (Tanda tangan) |

Keterangan:

\*) coret yang tidak perlu

\*\*) coret yang tidak perlu dan sesuaikan dengan tingkatannya